

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia belum benar-benar merasakan kemerdekaannya. Kekalahan Jepang dari pihak Sekutu dan Belanda, berakibat pada penyerahan kekuasaan dari Jepang kepada pihak Sekutu. Inggris tidak tahu menahu bahwa sebelumnya Republik Indonesia telah lahir melalui proklamasi 17 Agustus 1945 di depan rumah Laksamana Maeda disaksikan segelintir rakyat Indonesia.<sup>1</sup> Kedatangan sekutu bertujuan untuk menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang atas wilayah jajahnya (Indonesia) dan memulihkan kondisi pasca perang.

Situasi menjadi rumit, ketika rakyat di beberapa daerah mulai mengetahui bahwa pemimpin sipil di Jakarta telah memproklamasikan kemerdekaan. Respon rakyat terhadap kedatangan sekutu bersama Belanda beragam. Di wilayah Jawa, penolakan dan perlawanan paling sengit terjadi di Surabaya yang nantinya membawa dampak-dampak lain terhadap kolonialisme Belanda maupun bagi Bangsa Indonesia. berbeda dengan beberapa daerah di Jawa, raja-raja di luar Jawa yang menerima manfaat dan kekayaan dari Belanda tidak tertarik dengan Revolusi Indonesia.

---

<sup>1</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1994), hlm. 322.

Pembelahan sikap bangsa Indonesia atas kedatangan Belanda tidak hanya terjadi di kalangan rakyat. Di tubuh Pemerintah Indonesia pun terjadi perbedaan perspektif dalam menyikapi Belanda yang ingin menjajah kembali di Indonesia. Ditambah dengan dilema perjuangan melalui revolusi fisik (militer) dan perjuangan diplomasi mewarnai revolusi Indonesia. Perbedaan sikap antara pemimpin seperti yang ditunjukkan oleh Sukarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, Amir Syarifuddin, Natsir, dan para pendiri bangsa lain. Kesemuanya bermaksud memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan Ideologi masing-masing.

Kondisi Indonesia yang demikian, dimanfaatkan oleh Van Mook untuk menjajah kembali Indonesia.<sup>2</sup>Situasi menjadi semakin sulit ketika Bangsa Indonesia telah memproklamkan kemerdekaannya. Letjen Christison sebagai Komandan pasukan sekutu menyatakan tidak ada urusan politik dan tidak ikut terlibat dalam masalah politik internal Indonesia.<sup>3</sup> Tugasnya hanya menciptakan ketertiban hukum dan keamanan sehingga memudahkan dalam proses penyerahan kekuasaan dari Inggris kepada pemerintahan yang sah di wilayah tersebut. Maka Inggris mendesak agar diadakan konferensi antara pemerintah nasionalis Indonesia dan pemerintah kolonial Belanda sekaligus mendesak Pemerintah Belanda untuk menentukan sikapnya mengenai masa depan Hindia Belanda.<sup>4</sup>

Kondisi yang demikian membuat sulit Van Mook untuk kembali mengondisikan tanah jajahannya kembali. Dukungan dari sekutu yang terbatas

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 323.

<sup>3</sup>Agung Ide Anak Agung Gde, *Negara Indonesia Timur*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1985), hlm 5.

<sup>4</sup>*Ibid.*, Agung, Ide Anak Agung Gde, hlm 6.

pada stabilisator situasi menyulitkan Belanda untuk menguasai Indonesia. Di samping itu rakyat tanah jajahan sudah terpengaruh semangat kemerdekaan. Terlebih pergolakan yang terjadi di daerah turut memperkeruh suasana yang berdampak bagi Pemerintahan Republik Indonesia sekaligus bagi Belanda. <sup>5</sup>Jawa Timur menjadi wilayah yang strategis bagi Belanda untuk ditundukkan. Kedatangan pasukan sekutu di Surabaya pada bulan Oktober langsung mendapat reaksi perlawanan dari rakyat Surabaya. Pertempuran ini merupakan pertempuran paling heroik selama revolusi, sehingga menjadi simbol perlawanan terhadap Belanda dan Sekutu. Pertempuran ini yang nantinya juga akan berdampak pada berlangsungnya Negara Jawa Timur sebagai kepanjangan tangan Belanda.

Di sisi lain Sekutu yang diwakili Letjen Christison dan Van Mook melakukan kontak dengan Pemerintah Republik Indonesia.<sup>6</sup>Pada tanggal 2 November 1945 Sukarno memerintahkan untuk dilaksanakannya gencatan senjata. Namun rakyat surabaya tetap melakukan perlawanan tatkala Inggris pada tanggal 10 November 1945 membalas rakyat Surabaya dengan pengeboman dari udara dan darat yang meluluhlantakkan kota.<sup>7</sup> Tidak kurang dari separuh kota hancur dalam tiga hari yang mengorbankan ribuan rakyat dan tentara Inggris. Kematian Jendralnya di Surabaya membawa efek psikologis bagi Inggris untuk bersikap netral dalam posisinya antara Indonesia dan Belanda.

---

<sup>5</sup>*Ibid*, Agung. Ide Anak Agung Gde, hlm. 7.

<sup>6</sup>William H. Frederick, *Pandangan dan Gejolak Revolusi Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1988), hlm 259.

<sup>7</sup>*Op.Cit.*, M.C. Ricklefs, hlm. 332.

Di Jawa Timur, Van Mook menempatkan Van Der Plas sebagai utusannya. Berdasarkan analisis elite Jawa Timur, hingga november 1948, terdapat dua rencana jalan yang ditempuh untuk kemerdekaan indonesia. mengingat semakin berkurangnya kelompok kiri setelah peristiwa madiun 1948. Pertama, jalan kompromi melalui pemerintahan federal yang dipaksakan oleh Van Mook sebagai representasi Belanda. Kedua adalah jalan konfrontasi fisik untuk menggempur kekuatan militer belanda sampai hengkang. Kedua jalan ini juga hasil kompromi atas kedua belah pihak elite yang sama-sama ingin kemerdekaan Indonesia.

Simpati berdatangan dari India, Australia dan Amerika Serikat pada Republik Indonesia. Belanda sebagai pihak antagonis ditekan untuk menghentikan aksi polisional yang telah mengganggu perdamaian dunia. Namun tekanan dari dunia internasional tidak menghentikan kemauan Belanda untuk kembali meraih tanah jajahanya yang menggiurkan begitu saja. Mereka ingin sesegera mungkin menyelesaikan urusan tanah jajahan untuk menghindari tekanan lebih jauh dari dunia internasional terutama Amerika Serikat.

Perjanjian yang diadakan di kapal perang Renville menghasilkan beberapa kesepakatan yang tendensius menguntungkan belanda dan merugikan Republik Indonesia. Dimana wilayah kekuasaan republik menyempit hanya sebagian jawa saja. Karena wilayah-wilayah lain telah dikonsolidasikan untuk membentuk negara federasi sendiri hasil kesepakatan dengan belanda. Diantaranya adalah

Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Negara Pasundan dan yang belakangan adalah Negara Jawa Timur.<sup>8</sup>

Wilayah Negara Jawa Timur berasal dari Perjanjian Renville yang menghasilkan Garis Van Mook sebagai patokan dalam penentuan wilayah.<sup>9</sup> Wilayah di sebelah barat garis van mook milik republik Indonesia, sedangkan di bagian timurnya adalah wilayah pendudukan belanda yang nantinya menjadi cikal bakal Negara Jawa Timur. Wilayah tersebut hanya sebagian dari wilayah jawa timur hari ini, yaitu meliputi daerah karesidenan Malang, Besuki dan Surabaya.<sup>10</sup>

Agresi Militer I dan aksi-aksi polisionil Belanda di arahkan ke kantong-kantong pasukan republik indonesia. Belanda berhasil menguasai wilayah strategis dan mulai membangun Pemerintahan Jawa Timur. Melalui Van Der Plas sebagai RECOMBA Jawa Timur yang akan mengantarkan proses pendirian Negara Federal Jawa Timur.<sup>11</sup> Beragam cara dilakukan oleh Van Der Plas untuk mendirikan Negara Jawa Timur, salah satunya adalah mengkonsolidasikan kekuatan elite di daerah pendudukan yang masih pro-Belanda.

Di sisi lain, munculnya elit-elit baru dari militer dan kelompok sipil yang pro-Republik tidak membiarkan langkah yang ditempuh oleh Van Der Plas untuk

---

<sup>8</sup> Ide Anak Agung Gde Agung, *Renville*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), Hlm. 66-676

<sup>9</sup> Marsudi, *Negara Jawa Timur Dinamika Lokal pada Masa Revolusi*, UI, Depok, 2000, hlm. 50.

<sup>10</sup> Mashuri, *Daerah Malang Selatan pada Masa Perang Kemerdekaan 1947-1949*, (UI, Depok, 2000), hlm. 45.

<sup>11</sup> *Op.cit*, Marsudi, hlm, 53.

mendirikan Negara Jawa Timur. Kedatangan Belanda yang dilihat sebagai upaya penjajahan kembali di Jawa Timur, membuat para elite republikan mengambil langkah-langkah perlawanan terhadap Negara Jawa Timur. Cara yang ditempuh diantaranya melalui perlawanan fisik dan gerilya yang dilakukan oleh elit militer. Sedangkan yang dilakukan oleh elite sipil melakukan sebuah upaya perlawanan dari dalam Negara Jawa Timur melalui Dewan Perwakilan Sementara Negara Jawa Timur.

Situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil, berdampak pada rakyat secara langsung. Kelangkaan makanan pokok membuat rakyat merosot kesejahteraannya, ditambah dengan situasi perang gerilya yang terus menerus. Sebagian pabrik tidak mampu melakukan produksi, buruh-buruh menganggur. Rakyat melihat Negara Jawa Timur tidak becus mengurus sebuah negara, yang nantinya akan berdampak pada perlawanan rakyat melalui resolusi anti Negara Jawa Timur.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Bagaimana pertarungan elite dalam Negara Jawa Timur tahun 1948-1950?
- 1.2.2 Bagaimana sikap dan respon rakyat Jawa Timur terhadap Negara Jawa Timur?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Menjelaskan proses pertarungan elite di dalam Negara Jawa Timur.
2. Menjelaskan peran dan respon rakyat Jawa Timur terhadap Negara Jawa Timur.

Penelitian ini bermanfaat bagi semua warga negara Indonesia terutama warga Jawa Timur akan sejarahnya. Bahwa dalam perjalanan sejarahnya Jawa Timur pernah menjadi negara “independen” berbentuk federasi. Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan acuan mengelola pemerintahan yang baik dan benar. Sekaligus sebagai bagian dari upaya untuk memperkaya khazanah ilmu sejarah terkait kenegaraan dan nasionalisme di tingkatan lokal Jawa Timur.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dalam penelitian sejarah menggunakan batasan spasial dan batasan temporal. Batasan spasial dalam penelitian ini adalah Negara Jawa Timur sesuai dengan garis Van Mook sesuai perjanjian Renville. Wilayah Negara Jawa Timur adalah wilayah pendudukan Belanda di Jawa Timur yang meliputi sebagian Karesidenan Malang, Karesidenan Besuki, dan sebagian Karesidenan Surabaya.

Lingkup wilayah Negara Jawa Timur sebagai medan sejarah yang dinamis dalam kerangka sejarah Indonesia memang tidak pernah habis untuk diteliti. Penelitian terbaru hingga penelitian sejarah terus menerus dihasilkan dari obyek Jawa Timur. Negara Jawa Timur pada saat itu memang wilayah strategis dengan sumber daya alam dan perkebunan yang subur untuk bisa menyuplai pasokan

makanan bagi militer dan kepentingan kolonial. Selain itu, eksistensi pelabuhan surabaya yang ramai dan strategis menjadi salah satu pertimbangan dalam menjaga jawa timur dalam cengkraman Belanda.

Untuk keperluan penelitian ini, wilayah Jawa Timur yang dimaksud adalah bagian dari Jawa Timur yang mencakup seluruh wilayah dari pembatasan garis Van Mook.<sup>12</sup> Karena pada saat itu, untuk kepentingan Belanda dibentuklah negara indonesia serikat berikut batasan wilayahnya. Dari segi ini, dapat dilihat secara geografis wilayah yang tercakup tidak jauh berbeda dengan wilayah provinsi jawa timur sekarang kecuali Madura yang berdiri sendiri sebagai negara Madura.

Pada Agresi Militer Belanda I separuh wilayah Jawa Timur berhasil diduki Belanda. Wilayah Jawa Timur dibagi menjadi dua wilayah yang dibatasi oleh garis Van Mook, sebagai garis demarkasi yang memisahkan daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan *de facto* pemerintahan pendudukan Belanda dan pemerintahan Republik. Garis ini membujur dari bagian barat Gresik menuju ke selatan Mojoagung, terus ke selatan menuju puncak Gunung Arjuno, hingga ke Gunung Kawi. Ke timur melalui sebelah selatan Gunung Katu, Pakisaji, Krebet Bululawang, Tajinan, Ngembal, hingga ke Gunung Semeru. Ke selatan sepanjang Kaligliding (batas antara kabupaten malang dan kabupaten lumajang) hingga ke pantai samudera hindia. Dengan demikian, seluruh karesidenan Besuki, sebagian karesidenan malang, dan sebagian besar karesidenan surabaya berada di kawasan pemerintahan pendudukan Belanda.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>*Loc. Cit.*, Marsudi, hlm. 57.

<sup>13</sup>*Ibid*, Marsudi, hlm. 58.



Daerah tersebut berada di sebelah timur garis Van Mook. Di bagian barat garis tersebut merupakan wilayah pemerintahan Republik Indonesia yang meliputi Karesidenan Madiun, Kediri, dan Bojonegoro. Di sepanjang garis *status quo* pihak belanda menempatkan KL (*koninklijke Leger*), KM (*koninklijke Marine*) dan Barisan Cakra (barisan tentara dari Madura). Setelah sebagian besar wilayah dikuasi, Van Der Plas memiliki rencana strategis untuk daerah yang sudah dikuasi yang berkaitan dengan pemebntukan negara indonesia serikat. Jawa timur akan dijadikan negara bagian yang sifat, bentuk dan kedudukannya sama dengan negara bagian lain yang sudah terbentuk terlebih dahulu seperti negara bagian pasundan, dan lain-lain. Atau bisa jadi Jawa Timur akan dijadikan sebagai provinsi yang otonom dengan kepala pemerintahanya seorang gubernur dari orang Belanda, untuk jabatan residen ke bawah akan dipimpin oleh orang Indonesia.

Sebenarnya Van Der Plas bertendensi untuk membentuk Jawa Timur menjadi Provinsi yang akan memudahkannya mengendalikan dalam pemerintahan. Sekaligus biaya untuk pengelolaan provinsi lebih sedikit daripada harus menjadi negara federal yang lebih otonom. Akan tetapi di kemudian hari, karena beberapa faktor yang akan dijelaskan di pembahasan Van Der Plas menghendaki Jawa Timur sebagai negara federal.<sup>14</sup>

Sedangkan untuk Madura, beberapa elite dari kabupaten-kabupaten di Madura dengan dimotori oleh pihak Belanda kemudian membentuk semacam

---

<sup>14</sup>Menurut Marsudi, dikatakan bahwa konsep negara bagian yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh Van Mook ini tetap dijalankan adalah untuk mengepung dan melikuidasi Republik Indonesia. Bahkan pembentukan negara bagian ditujukan kepada dunia internasional bahwa Republik Idonesia tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia. *ibid*, hlm. 49-50.

panitian Komite Penentuan Kedudukan Madura. Komite inilah yang selanjutnya berperan besar terhadap deklarasi dan resolusi lahirnya Negara Madura. Pada akhirnya negara Madura mendapa pengakuan pemerintahan pendudukan Belanda pada tanggal 20 Februari 1948. Sisa wilayah jawa timur yang masuk dalam wilayah pendudukan Belanda baru mendapat pengakuan pemerintahan negara federal pada tanggal 26 November 1948.<sup>15</sup>

Batasan temporal penelitian ini dimulai dari tahun 1948 hingga 1950 sesuai dengan pembentukan dan berakhirnya status negara Jawa Tmur. Akan tetapi seperti Kuntowijoyo, untuk kepentingan penelitian memang dibatasi dalam periode tersebut. Tetapi untuk menjelaskan periode tersebut, dibutuhkan penjelasan dan uraian atas realitas sejarah sebelum tahun 1948 dan sesudah 1950. Karena sejarah tidak bisa dipotong dalam waktu tertentu yang terpisah dari sebelumnya dan sesudahnya. Untuk melihat keutuhan realitas Negara Jawa Timur di tahun tersebut, butuh untuk melihat kondisi di tahun sebelumnya. Bagaimana proses revolusi kemerdekaan dimulai.

Periode 1948-1950 merupakan periode krusial bagi sejarah Indonesia. Umur Indonesia yang masih baru beberapa tahun berusaha melepaskan diri dari pendudukan Belanda dan Jepang. Proses revolusi nasional dan yang bersamaan dengan revolusi di daerah seringkali berjalan sendiri. Periode yang menentukan perjuangan mempertahankan wilayah Indonesia di tengah krisis politik internasional, nasional sampai lokal.

---

<sup>15</sup>Ari Sapto, *Republik dalam Pusaran Elite Sipil dan Militer*, (Yogyakarta: Matapadi Pressindo, 2019), hlm. 82

Periode ini dalam beberapa penelitian periode revolusi dilihat sebagai sebuah periode perjuangan penuh untuk kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa elite di daerah juga seringkali bertarung untuk merebut kekuasaan. Seperti pertarungan antara Kusumonegoro sebagai Wali Negara Jawa Timur bersaing dengan Gubernur Militer Sungkono dalam merebut simpati rakyat. pertarungan ini yang kiranya melingkupi mozaik sejarah revolusi Indonesia di tingkat daerah.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Kajian tentang Negara Jawa Timur relatif sedikit di Indonesia. Bahkan penelitian dalam periode sekitar masa revolusi fisik pun terbilang belum banyak. Beberapa buku dan penelitian tentang Negara Jawa Timur maupun daerah lain di masa revolusi dihimpun untuk digunakan sebagai referensi. Di bawah akan kami jelaskan posisi penelitian ini dengan penelitian dan terbitan buku yang sudah ada.

Negara Jawa Timur bentukan Belanda berlangsung semasa revolusi fisik. Hal ini semakin mempersempit ruang untuk melakukan penelitian untuk tema dan periode tersebut. Meskipun begitu, penelitian ini menarik karena hanya beberapa orang yang secara spesifik meneliti tentang dinamika Negara Jawa Timur di masa revolusi.

Beberapa penelitian tentang negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat diantaranya dilakukan oleh peneliti juga pelaku sejarahnya, yaitu Ide Anak Agung Gde Agung. Buku terbitan tahun 1985 oleh Gajahmada University Press ini berjudul *Dari Negara Indonesia Timur (NIT) ke Negara Indonesia Serikat*.

Gde Agung membahas secara rinci perkembangan NIT dari awal pembentukan sampai bergabungnya kepada Republik Indonesia. Pembahasan dalam buku ini dimulai sejak pergolakan politik Indonesia dan Belanda pasca perang kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia dalam perundingan belum diakui oleh Belanda, dalam perundingan-perundingan selanjutnya wilayah bekas Hindia Belanda beberapa diantaranya menjadi wilayah Belanda dan wilayah Republik.<sup>16</sup>

Setelah gagalnya konferensi “Hoge Veluwe” di Negeri Belanda, Van Mook melakukan perubahan ketatanegaraan di luar daerah kekuasaan RI yang telah diduduki tentara sekutu. Di wilayah bagian timur Indoneisa yang dikenal sebagai Timur Besar (kecuali Bali) diduduki oleh Tentara Australia yang bermarkas di Morotai. Dimulailah peralihan kekuasaan dari Jepang kepada pemerintahan sipil belanda (NICA). Pembahasan yang rinci dari konferensi Malino sampai Konferensi Denpasar yang menghasilkan keputusan dipilihnya suatu sistem federal sebagai susunan ketatanegaraan di wilayah Timur Besar. Meskipun dalam hasil konferensi Malino, semua peserta konferensi menghendaki tidak kembalinya kolonialisme apapun di Bumi Indonesia.<sup>17</sup>

Tidak mengherankan jika buku ini menjadi salah satu rujukan penting dalam pembahasan terkait negara bagian pada masa revolusi. Gde Agung seorang tokoh sentral dalam NIT sebagai Menteri Urusan dalam Negeri dan Perdana Menteri pada tahun 1950.<sup>18</sup> Perspektif yang dipakai oleh Gde Agung memang

---

<sup>16</sup>*Loc. Cit.*, Agung Ide Anak Agung Gde, hlm. 2-4.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 111.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. v.

menangkap peran elite dalam pertarungan internal di NIT juga berhadapan dengan pemerintah Belanda. Pergantian tiap kabinet digambarkan secara detail dengan susunan kabinet dan sidang-sidang dalam parlemen. Maka dari itu, buku ini sangat penting sebagai acuan penelitian tentang Negara Jawa Timur yang lahir belakangan. Meskipun sebagai asumsi awal, NIT dapat dikatakan cukup berhasil dalam melaksanakan pemerintahan daripada Negara Jawa Timur yang banyak mendapatkan penolakan baik dari Elite maupun rakyat. Pada titik inilah, perbedaan mendasar yang kiranya menjadikan Negara Jawa Timur sebagai negara bagian yang unik.

Penelitian lain yang secara tematik dan waktunya berkaitan dengan penelitian kami adalah *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950* karya Mistika Zed. Buku yang dihasilkan dari disertasi penulisnya di Vrije Universiteit ini memotret Palembang pada masa revolusi dengan berbagai aksi kekerasan dan konflik internal yang terjadi seiring dengan euforia anti-jepang, anti-Belanda, dan anti-Sekutu.<sup>19</sup>Kondisi di Palembang lebih siap menghadapi revolusi dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera. Formula politik yang dilakukan oleh para elite revolusi di Palembang inilah yang disorot oleh Mistika dalam penelitiannya. Salah satu unsur elite revolusi yang menjadi kunci adalah pialang politik yang bermain dalam menghubungkan pemimpin politik dan rakyat, khususnya Adnan Kapau Gani dalam percaturan politik internal daerah Palembang.

---

<sup>19</sup>Mistika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*, (Jakarta, Pustaka LP3ES, 2003), hlm. 328.

Perspektif Mistika dalam melihat revolusi di Palembang memiliki keunikan tersendiri. Jika menganut Kahin, revolusi Indonesia digerakkan oleh elite dan rakyat secara sporadis dari pusat hingga daerah. Mistika melihat peran pialang politik dalam menghubungkan antara elite revolusi dengan rakyat sebagai sebuah kunci dalam penelitiannya. Pialang sebagai *middleman* (perantara) yang mengantarkan kehendak politik elite kepada rakyat di Palembang, menerjemahkan maksud dari revolusi dan menggerakkan rakyat.<sup>20</sup> Itulah yang hendak disampaikan oleh Mistika Zed dalam penelitiannya yang telah menyumbangkan perspektif dan temuan baru bahwa Revolusi Indonesia tidak semata-mata tentang Elite-Massa saja, melainkan ada aktor-aktor lain yang berpengaruh dalam jalannya revolusi. Untuk itu, penting buku ini untuk dikutip sebagai perspektif memahami peran perantara dalam menghubungkan Elite-elite Negara Jawa Timur dengan rakyat. Meskipun begitu, tidak sepenuhnya apa yang terjadi di Jawa Timur pada masa revolusi sama halnya dengan yang terjadi di Palembang. Titik pembeda yang paling jelas adalah fokus penelitian Mistika yang menyoroti aktor revolusi yang disebut pialang politik. Sedangkan penelitian ini fokus pada elite-elite yang bertarung dalam Negara Jawa Timur dan respon rakyat menghadapi Negara Jawa Timur.

Buku lain yang juga berasal dari penelitian tentang revolusi di daerah adalah karya Robert Bridson Cribb. Berjudul *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1949*, melalui karyanya ini Cribb dapat disebut sebagai inisiator kajian revolusi Indonesia di daerah. Cribb mengkritik peneliti pendahulunya yang melihat Revolusi Indonesia dari perspektif Nasional (pusat) saja, sedangkan perspektif

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 31.

kedaerahan cenderung dilupakan. Mengingat pada saat penelitian itu diteliti, juga berkaitan erat dengan keterbukaan sumber arsip dan data yang mendukung kajian revolusi Indonesia dari perspektif daerah. Ketika Jepang menyerah, bangsa Indonesia sudah matang untuk memulai dua revolusi. Pertama yang selama ini dikenal sebagai proklamasi kemerdekaan yang diiringi oleh tindakan tergesa-gesa menyusun negara republik dan perangkatnya. Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia memilih Sukarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dan mengesahkan UUD.<sup>21</sup>

Beriringan dengan revolusi nasional, terjadi revolusi sosial yang terjadi di beberapa daerah. Targetnya adalah melawan sisa-sisa pendukung tatanan kolonial, dan tatanan pendudukan yang lebih belakangan. Cribb melihat Jakarta sebagai salah satu daerah yang juga sedang berlangsung revolusi sosial, meskipun posisinya di pusat. Tidak adanya kelompok elite di Jakarta tidak menjadikan masyarakat Betawi tercerai berai. Pada kenyataannya, revolusi dijalankan oleh para Jago (Bos setempat) yang dalam prakteknya menggantikan peran kapitan pada masa lalu. Mereka saling terhubung dalam poros yang pada intinya seperti Bapak-Anak buah, hubungan patron-klien khas Indonesia klasik, yang didasari spiritual.<sup>22</sup>

Seperti yang tertulis dalam judulnya, Cribb hendak memotret kondisi revolusi di Jakarta yang berputar pada otonomi kedaerahan dan Hegemoni pusat (Yogyakarta). Jakarta pada saat itu juga mirip kondisinya dengan Jawa Timur,

---

<sup>21</sup>Robert Bridson Cribb, *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1959 Pergulatan antara Hegemoni dan Otonomi*, (Jakarta: Grafiti, 1994), hlm. 1-7.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 29

ditinggalkan karena dikuasai oleh Belanda, sehingga memunculkan dualisme “negara” Republik Indonesia dan Negara Pasundan yang disponsori Belanda.<sup>23</sup>Kondisi yang demikian membuat karya Cribb tidak bisa dilewatkan dalam fungsinya memberikan referensi terkait pertarungan elite dan aktor-aktor revolusi di Jakarta. Sebagai pembanding, di Jawa Timur bahkan terdapat 3 “negara”, republik Indonesia yang berkuasa di sebelah barat, Negara Jawa Timur di Sebelah Timur, dan Negara Madura di Pulau Madura. Meskipun begitu, Penelitian kami tentang Negara Jawa Timur tentunya berbeda dalam konteks traumatik sebelum adanya Negara Jawa Timur yang dialami pada awal kedatangan Sekutu dan Belanda di Surabaya. Kiranya kondisi revolusi di Jakarta dan di Jawa Timur memang memiliki keunikan masing-masing untuk terus diteliti lebih lanjut.

Buku terbitan lama dari dinas pendidikan berjudul *Sejarah Daerah Jawa Timur* yang membahas sebagian kecil tentang proses pembentukan Negara Jawa Timur hingga pembubaranya. Di buku tersebut lumayan detail terkait tokoh dan organisasi yang berperan dalam pembentukan Negara Jawa Timur. Meskipun tidak disebutkan latarbelakang tokoh dan motif di belakangnya dalam posisinya mendukung Negara Jawa Timur. Di sisi lain juga disebutkan beberapa tokoh dan organisasi yang nantinya menolak Negara Jawa Timur. Posisi tokoh dan organisasi yang pro-republik ini juga tidak disebutkan secara detail motif politisnya. Juga patut disayangkan bahwasanya banyak uraian yang tidak disertai

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 20



sumber kutipanya. Sehingga validitasnya juga bisa dipertanyakan dan diuji ulang dengan sumber lain dan penelitian lebih lanjut.<sup>24</sup>

Penelitian yang memiliki kedekatan dengan penelitian ini adalah penelitian dari Mashuri berjudul “Daerah Malang Selatan pada Masa Perang Kemerdekaan 1947-1949”.<sup>25</sup> Mashuri secara spesifik membahas bagian dari wilayah yang pada saat itu menjadi wilayah Negara Jawa Timur. Pembahasan Mashuri meliputi perjuangan kaum republikin melawan Pendudukan Belanda dengan berbagai cara. Mashuri menunjukkan fakta-fakta bahwa malang, terutama daerah selatan merupakan basis perjuangan kaum republikin. Pembahasan lebih banyak terkait peperangan yang terjadi di daerah tersebut dan aktor-aktor beserta strategi yang ditempuh. Pertempuran dengan cara bergerilya menjadi salah satu perspektif dan fakta yang ditekankan oleh peneliti. Sedangkan dalam Perjanjian Renville ditulis untuk mengantarkan peneliti pada fakta perang gerilya sebagai akibat ketidakpuasan politik. Proses politik tidak banyak disebut dalam penelitian tersebut yang sebenarnya sangat kental akan nuansa politik beserta konflik dan intrik-intriknya. Persinggungan kaum *republikin* di malang selatan dengan Negara Jawa Timur hanya sedikit. Namun begitu, penelitian mashuri berperan untuk penelitian ini dalam menjelaskan fakta-fakta perjuangan kaum republikin melawan Belanda dan Pemerintahan Negara Jawa Timur di daerah Malang Selatan.

---

<sup>24</sup>Proyek Penelitian dan Pencatatan kebudayaan Daerah, *Sejarah Daerah Jawa Timur*, , (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hlm. 73

<sup>25</sup>*Loc. Cit.*, Mashuri.

Penelitian lain berupa Tesis di Universitas Indonesia oleh Marsudi berjudul *Negara Jawa Timur Dinamika Lokal pada Masa Revolusi*.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, memang lebih lengkap bagaimana Negara Jawa Timur berdiri diantara tegangan kepentingan nasionalisme kesatuan, atau nasionalisme federal atau bahkan yang ingin mendirikan negara sendiri. Proses tarik-menarik kepentingan yang dilakukan oleh elitnya tidak digambarkan dengan detail. Titik fokusnya lebih pada gambaran umum proses pembentukan melalui konferensi di Bondowoso hingga tuntutan untuk pembubaran Negara Jawa Timur. Secara lebih rinci, penelitian marsudi mencoba merangkai dinamika Negara Jawa Timur sebagai negara bagian melalui pendekatan elite sosial dan politik. Dimana Van Der Plas mendapat sorotan yang cukup banyak dalam memainkan peranan untuk mengatur strategi dengan memilih orang-orang yang loyal terhadap Belanda untuk membuat Partai Rakyat Jawa Timur yang akan membidani lahirnya Negara Jawa Timur. Sekaligus menjelaskan bagaimana Van Der Plas sebagai salah seorang islamolog yang mampu berkomunikasi dengan beberapa ulama untuk mendukung taktiknya menduduki Jawa Timur.

Pembahasan mengenai tokoh Van Der Plas cukup banyak disinggung oleh Rosihan Anwar dalam bukunya *Singa dan Banteng (Sejarah Hubungan Belanda-Indonesia 1945-1950)*.<sup>27</sup> Rosihan menggambarkan dengan cukup cermat bagaimana Van der Plas memainkan perannya sebagai Gubernur Jawa Timur sebelum pendudukan Jepang. Pengetahuannya yang luas tentang kondisi Jawa

---

<sup>26</sup>*Loc. Cit*, Marsudi, hlm. 51.

<sup>27</sup>Buku kumpulan tulisan dari Rosihan Anwar ini cukup memberi penjelasan terkait mozaik sejarah Indonesia dari nasional maupun lokal.

Timur sebelum pendudukan Jepang dijadikan sebagai bekal untuk kembali menancapkan kolonialisme Belanda di Jawa Timur melalui RECOMBA Negara Jawa Timur. Bahkan rosihan menggambarkan Van Der Plas sebagai sosok yang misterius dengan menginisiasi pemberian senjata otomatis sebanyak satu truk untuk diberikan pada tentara Darul Islam.<sup>28</sup> Selain pengetahuannya yang mampu menarik simpati banyak kelompok, semisal memberi Kitab Suci pada kalangan ulama di Jawa Timur. Lagi-lagi peran Van Der Plas diberikan porsi lebih dalam pemerintahan Jawa Timur dengan memaparkan pemikiran-pemikirannya. Ada enam poin yang ditulis oleh Rosihan tentang Pemikiran Van Der Plas diantaranya keinginannya untuk menjadikan Indonesia merdeka meskipun harus menjadi bagian dari Uni-Belanda.

Jurnal yang cukup baru diantaranya dihasilkan oleh Ari Sapto, berjudul *Nasionalisme Lokal Elite Jawa Timur dalam Krisis Pemerintahan Republik Indonesia tahun 1948-1950*. Penelitian ini cukup membantu dalam penelitian penulis untuk menjelaskan nilai-nilai yang dianut oleh para elite Jawa Timur dalam menyikapi revolusi dan upayanya memperjuangkan 100% kemerdekaan Indonesia. rasa nasionalisme yang tumbuh dan disebarkan oleh elite Jawa Timur yang nantinya memberikan sengatan bagi rakyat Jawa Timur untuk bersikap terhadap Negara Jawa Timur dan Republik Indonesia.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Rosihan Anwar, *Singa dan Banteng Sejarah Hubungan Belanda Indonesia 1945-1950*, (Jakarta: UI Press, 1997), hlm.154-156.

<sup>29</sup>Ari Sapto, *Nasionalisme Lokal Elite Jawa Timur dalam Krisis Pemerintahan Republik Indonesia tahun 1948-1950*

Buku lain yang juga patut untuk ditinjau dalam penelitian ini adalah buku hasil penelitian William H. Frederick berjudul *Pandangan dan Gejolak Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)*. Buku ini menjelaskan secara rinci gejolak revolusi di Surabaya sekitar tahun 1945-1946. Frederick melihat unsur-unsur pembentuk revolusi berakar pada kebijakan politik kolonial dan akibat-akibatnya. Munculnya elite modern di Surabaya hasil pendidikan Barat yang ingin menunjukkan eksistensinya. Kampung-kampung yang menjadi kantong revolusi merupakan hal unik yang bisa ditemui dari buku ini. Selain itu, Elite Surabaya yang memainkan perannya dalam proses revolusi melalui pemerintahan (birokrasi) maupun politik (pengerahan massa dan organisasi). Tokoh-tokoh semacam Ruslan Abdulgani, Dul Arnowo, dan tokoh-tokoh lain mendapat porsi pembahasan yang cukup mendetail. Perannya dalam menggerakkan massa, memimpin organisasi, sekaligus pemerintahan dari pusat tentang berjalanya revolusi. Latarbelakang tokoh-tokohnya juga dijelaskan.<sup>30</sup>

Frederick cukup detail dalam melihat unsur pemuda dan rakyat dalam gerak revolusi masyarakat urban di Surabaya.<sup>31</sup> Untuk itu, buku ini sangat berguna bagi penelitian kami untuk menjelaskan proses sebelum terbentuknya Negara Jawa Timur yang berpusat di Surabaya. Sejauh ini, jika dibandingkan dengan negara bagian lain, Negara Jawa Timur adalah negara bentukan Belanda yang paling tidak berhasil. Temuan awal kami menunjukkan bahwa Negara Jawa Timur

---

<sup>30</sup>William H. Frederick, *Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989) hlm. 270.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 246.

tidak berjalan dengan baik dikarenakan pertempuran 10 November di Surabaya sebagai salah satu faktornya.

Penelitian lain dilakukan oleh Tri Anugrahwati untuk menyelesaikan Skripsi jurusan sejarah UI. Berjudul *Pembentukan dan Berakhirnya Negara Federal Jawa Timur*.<sup>32</sup> Penelitian ini bisa dikatakan penelitian yang sederhana namun detail secara deskripsi. Tidak banyak analisis yang dilakukan oleh Anugrah dalam skripsinya. Contoh, Anugrah tidak melibatkan analisis politik dan kepentingan dalam melihat proses pembentukan Negara Jawa Timur melalui sidang-sidang sengit, dan berbagai cara yang dilakukan oleh Recomba Jawa Timur untuk membentuk Negara Jawa Timur.<sup>33</sup> Persidangan hanya dinarasikan sejauh arsip berbunyi demikian. Ada satu hal yang menarik dari penelitian ini terkait perspektif peneliti tentang kelompok federalis. Anugrah menyebut mereka sebagai kelompok pemberontak yang terkesan sembrono jika melihat himbuan Hatta untuk tidak menyebut kaum federalis tidak memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Penelitian terakhir yang cukup dalam tentang Jawa Timur pada masa revolusi adalah hasil penelitian Disertasi Ari Sapto. Berjudul *Republik dalam Pusaran Elite Sipil dan Militer*, Sapto memotret ketegangan dan pertarungan kekuasaan antara pemimpin sipil dan militer dalam perebutan kekuasaan di Jawa Timur. Dimana elite sipil memainkan peranya melalui organisasi-organisasi yang dibentuk oleh kalangan sipil sebagai modal politiknya. Sebaliknya kalangan

---

<sup>32</sup>Tri Anugrah, *Pembentukan dan Berakhirnya Negara Jawa Timur*, (Jakarta, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1990) hlm. 45.

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 41-43.

militer memakai persenjataan dan pendidikan militernya (baik KNIL dan PETA) sebagai modalnya. Dalam bukunya Ari Sapto mengklasifikasi Elite Jawa Timur berdasarkan latarbelakangnya. Diantaranya adalah elite Militer, Elite KPPD (Komisariat Pemerintah Pusat di Djawa), Elite Komunis Nasional, Elite Militer Politik, Elite Negara Madura, Elite Negara Jawa Timur. Dari kategori ini, Sapto mendedahkan kepentingan dibalik kelompok elite, posisi dan keberpihakanya, serta terutama yang signifikan dari penelitian ini adalah nilai-nilai yang dianut oleh para elit dalam mengambil sikapnya menghadapi realitas.

Dalam konteks ini, nilai-nilai yang dianut oleh Elite Republiken lebih banyak disoroti oleh Ari Sapto. Sedangkan elite lain hanya disinggung sedikit, Pergerakan revolusioner Tan Malaka juga disorot cukup banyak oleh Sapto. Sedangkan Negara Jawa Timur hanya dijelaskan sepintas saja. Karena keluasan pembahasannya, penelitian yang akan kami lakukan sangat terbantu oleh buku ini. Terutama menjelaskan konteks Elite dan Nilai-nilai yang dianut oleh para elite di Jawa Timur. Sedangkan penelitian yang akan kami lakukan terfokus pada pertarungan elite dan respon rakyat di dalam Negara Jawa Timur yang wilayahnya hanya sebagian dari Jawa Timur.<sup>34</sup>

Kurang lebih posisi penelitian ini berupaya untuk melengkapi ruang kosong perspektif sejarah politik dan sejarah sosial dari Negara Jawa Timur yang belum terungkap semuanya. Tabir-tabir politis kolonial harus dibongkar untuk melihat secara jernih kondisi terdalam rakyat jawa timur menyikapi Negara Jawa

---

<sup>34</sup>Ari Sapto, *Nasionalisme Lokal Elite Jawa Timur dalam Krisis Pemerintahan Republik Indonesia tahun 1948-1950*, Jurnal Sejarah Universitas Negeri Malang, hlm. 76.

Timur, lebih-lebih kolonial belanda yang ingin kembali meraih pengaruh koloninya.

Penelitian sebelumnya yang menitikberatkan fokusnya pada subyek elite mengandung kekurangan karena tanpa dukungan dari rakyat mereka tidak bisa berbuat banyak. Baik elite yang mendukung republik maupun elite yang mendukung Belanda tidak dapat berbuat banyak jika tidak mendapat sokongan dari rakyat. Di titik ini penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang masih membahas secara elitis.

### **1.6 Kerangka Konsep**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejarah politik yang bersifat multidimensional. Menurut Sartono Kartodirjo dalam bukunya Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial, sejarawan bisa memakai pendekatan politik multidimensional untuk menjelaskan realitas sejarah. Dalam hal ini beberapa konsep politik dan sosial bahkan ekonomi dipakai untuk membongkar kebenaran sejarah tentang Negara Jawa Timur yang berumur singkat ini. Di dalamnya terdapat konsep negara federal, pertarungan antar elite, kontestasi kepentingan, hingga peranan rakyat di Jawa Timur.

Negara Jawa Timur merupakan sebuah negara bagian dari Negara Indonesia Serikat yang menganut sistem pemerintahan federal. Pembentukan Negara Jawa Timur sebagai bagian dari rencana Belanda untuk memecah belah Indonesia tidak selamanya mudah.<sup>35</sup> Bentuk negara federasi tentunya perlu

---

<sup>35</sup>*Op.Cit.*, Mc. Ricklefs hlm. 345.

dibahas sebagai kerangka konsep penelitian sebagai bingkai atas fakta sejarah yang ada. Negara federal diantara cirinya adalah penyesuaian antara dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal secara keseluruhan dan kedaulatan negara bagian. Penyelenggaraan negara kedaulatan keluar dari negara-negara bagian diserahkan sama sekali pada pemerintahan federal sedangkan kedaulatan ke dalam dibatasi.

Untuk membentuk negara federal setidaknya diperlukan dua syarat. Pertama adanya perasaan sebangsa diantara kesatuan politik yang hendak membentuk federasi itu. Keduanya adanya keinginan pada kesatuan-kesatuan politik terbatas, oleh karena jika kesatuan-kesatuan politik tersebut menghendaki persatuan bukan federasi yang terbentuk akan tetapi negara kesatuan. Selain itu, faktor finansial harus diperhatikan untuk membentuk negara finansial. Terutama bagaimana tiap negara bagian tetap bisa menyejahterakan daerahnya tanpa bergantung pada pemerintah pusatnya.

Federalisme sebagai basis dari Negara Federal dapat didefinisikan sebagai alat konstitusional untuk menjamin desentralisasi kekuasaan di dalam suatu negara melalui pengaturan pembagian kekuasaan di atas basis kedaerahan.<sup>36</sup> Jadi negara federal berbeda secara teknis dengan desentralisasi teritorial lainnya (seperti pemerintahan daerah dan provinsi, regionalisme) karena pengertian pengaturan diwujudkan dalam bentuk konstitusional fundamental negara.

Untuk memahami pertarungan elite di Negara Jawa Timur, membutuhkan alat bantu berupa konsep Elite dan Perilaku Politik para Elite. Elite secara umum

---

<sup>36</sup>*Op. Cit*, Marsudi, hlm. 64.



merupakan kelompok kecil masyarakat yang mempengaruhi sejumlah besar masyarakat yang lain. Menurut Pareto, elite merupakan sebuah kelas tertinggi dari setiap cabang kehidupan.<sup>37</sup> Seperti pengusaha, diantara sekian banyak pengusaha, ada di antara mereka yang berpenghasilan lebih dari 1 triliun, dan diantara yang lain di bawahnya, hingga yang terkecil. Untuk menyebut pengusaha yang berpenghasilan paling tinggi dari yang lain itulah Pareto menyebut kelas elite.

Mosca, Teoritisi lain yang fokus terhadap Elite, mendefinisikan Elite dari tesis dasar bahwa dalam sebuah masyarakat terdapat dua kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai. Kelas yang berkuasa melaksanakan semua fungsi kekuasaan, menikmati kekuasaan dan keistimewaan yang diberikan oleh kekuasaan. Secara jumlah kelas yang berkuasa lebih sedikit atau minoritas daripada kelas yang dikuasai. Mosca menerangkan bahwa kelas yang berkuasa menguasai dengan fakra bahwa mereka teroganisir.<sup>38</sup>

Dalam konteks Negara Jawa Timur, para elite-nya berasal dari berbagai wilayah dan latarbelakang politik, sosial, pendidikan yang membuat mereka saling bersaing maupun bekerjasama untuk kepentinganya. Wilayah Negara Jawa Timur meliputi wilayah pendudukan Belanda di Jawa Timur berpengaruh pada preferensi politik. diantaranya adalah sebagian karesidenan Surabaya, sebagian karesidenan Maang dan Karesidenan Besuki.

Elite Negara Jawa Timur dapat dikelompokkan menjadi elite baru dan elite tradisional (priyayi). Elite baru merupakan elite yang memperoleh status

---

<sup>37</sup>T.B. Bottomore, *Elite dan Masyarakat*, (Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2006), hlm. 2.

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 4.

politiknya melalui serangkaian gerakan politik dan gerakan massa pada masa revolusi, seperti yang paling terkenal adalah Doel Arnowo. Sedangkan elite tradisional merupakan pejabat pribumi (Priyayi) yang menjadi pegawai belanda sebelum perang kemerdekaan hingga kembalinya Belanda ke Jawa Timur. Contoh yang paling kongkret adalah Kusumonegoro, Wali Negara Jawa Timur yang merupakan mantan bupati Banyuwangi.

William H. Frederick menerangkan pandangan penduduk kampung surabaya tentang priyayi sebagai orang yang misterius. Mereka para priyayi memiliki kebudayaan tersendiri yang menganut pada budaya jawa tengah. Aturan Priyayi, mereka tidak bergaul dengan rakyat dan penduduk kampung, dan memang penduduk kampung seringkali merasa bahwa para priyayi takut dan menghindari kontak dengan penduduk kampung.<sup>39</sup>

Sedangkan elite baru yang dimaksud dalam konteks masa revolusi di wilayah Negara Jawa Timur adalah sekelompok orang yang memperoleh kedudukan sosial tinggi berkat peran sosial dan politiknya pada masa revolusi melalui kepemimpinan gerakan massa dan revolusi. Menurut Frederick, kelas baru ini berasal dari orang-orang yang secara samar berada di tengah rakyat dan pangreh praja (priyayi). Tapi juga bukan berarti pengembangan dari elite tradisional, meskipun beberapa diantaranya merupakan keturunan dari elite tradisional (priyayi).<sup>40</sup> Konsep elite baru ini tidak *rigid*, hanya sebagai pengantar awal memahami konsep elite dalam konteks Negara Jawa Timur. Perdebatan terkait elite oleh beberapa ilmuwan sosial dan ilmuwan politik tidak menjadi fokus

---

<sup>39</sup>*Loc. Cit.*, William H. Frederick hlm. 27.

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 43.

dalam pembahasan selanjutnya. Konsep elite dipakai secara umum dan sedikit lebih spesifik dalam kurun waktu revolusi dan ruang Negara Jawa Timur.

Elite di dalam Negara Jawa Timur dapat digolongkan menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok Federalis dan kelompok Republikan. Pembagian ini berawal dari sebutan kelompok satu kepada kelompok lain secara serampangan. Kelompok Federalis adalah sebutan bagi kelompok yang membela dari awal Negara Jawa Timur dan cenderung patuh terhadap perintah dari Belanda. Sedangkan kelompok Republikan adalah kelompok yang membela kepentingan Republik Indonesia dan oposisi terhadap Negara Jawa Timur.

Kedua kelompok tersebut secara lebih detail bukan berdasarkan analisis ilmiah akademis. Melainkan sebagai sebutan politis bagi kubu politik. Berbagai literatur koran sejaman sudah memakai kedua sebutan tersebut. Bahkan Van der Plas juga memakai sebutan ini dalam suratnya kepada Dr. Bell untuk melaporkan kondisi politik di Jawa Timur.

Secara lebih rinci, kelompok federalis mayoritas merupakan elite pribumi tradisional yang mendapatkan pendidikan modern. Meskipun tidak bisa secara kaku semua elite pribumi tradisional yang mendapat pendidikan modern dapat dikelompokkan sebagai federalis. Mayoritas yang dapat dikelompokkan sebagai *Federalis* adalah para Bupati, Priyayi, dan mantan pejabat pribumi Hindia Belanda yang masih loyal kepada Belanda. Kata kuncinya terdapat pada loyalitas kepada Belanda dengan segala perintahnya. Elite yang bisa dikelompokkan sebagai *Federalis* diantaranya adalah R.T.P Achmad Kusumonegoro, Mr.

Djoewito, R. Soejadi, dan lain sebagainya yang akan lebih rinci dijelaskan di dalam Bab 2.

Kelompok *Republiken* mayoritas berasal dari orang-orang baru yang mendapat kesempatan di dalam situasi revolusi. Kekuasaan menarik orang-orang pribumi baru yang mampu memimpin massa melalui kharisma, kemampuan pidato, maupun organisasi. Di antara mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pendidikan, baik modern maupun tradisional. Orang-orang *Republiken* pada intinya adalah orang-orang yang loyal dan membela kepentingan dari Republik Indonesia. Elite yang bisa dikelompokkan sebagai *Republiken* diantaranya adalah Mr. Indrakasuma, Mr. Zoetmoelder, dan lain sebagainya yang lebih rinci akan dijelaskan di Bab 2.

Dalam Penelitian ini juga dimungkinkan untuk memakai perangkat analisis berupa teori gerakan massa. Konsep gerakan massa dipakai untuk memahami respon rakyat terkait dengan keberadaan Negara Jawa Timur. Teori gerakan massa juga dipakai sebagai alat analisis menjelaskan protes sosial dan gerakan massa yang dilakukan oleh rakyat di bawah pemerintahan Negara Jawa Timur. Eric Hoffer menyebut gerakan massa, tidak peduli sifatnya (agama, ras, sosial, nasionalis, atau ekonomi), tidak peduli misi suci yang dibawa, memiliki beberap ciri tertentu yang sama. Kesemuanya mampu membangkitkan pada setiap orang dalam gerakan untuk beraksi secara kompak, fanatik, antusias, harapan yang berapi-api, kebencian dan intoleransi, kepercayaan buta dan kesetiaan tunggal. Orang-orang frustrasi sedang mengalami kekecewaan pada diri sendiri karena kegagalan-kegagalan, merasa hidupnya sudah rusak, sia-sia, tidak ada yang

menolong, dan tidak ada lagi harapan. Tipe masyarakat atau orang semacam inilah yang menjadi lahan subur timbulnya gerakan massa.<sup>41</sup>

Teori yang diajukan oleh Eric Hoffer berkesesuaian dengan kondisi pada masa revolusi di Jawa Timur. Situasi ekonomi yang memburuk akibat perang yang terus berkelanjutan. Situasi politik yang tidak stabil, perang dan pemberontakan terjadi di sepanjang wilayah Jawa Timur. Sedangkan kendali rakyat dipegang oleh Negara Jawa Timur yang dianggap sebagai kepanjangan tangan Belanda. Kondisi semacam ini yang nantinya mudah untuk menggerakkan rakyat untuk melakukan gerakan protes melawan NJT. Kerjasama antara elite dan massa yang memiliki tujuan yang sama adalah salah satu pendorong terkuat dalam gerakan massa. Sesuai dengan pendapat Hoffer, kebencian yang ditimbulkan oleh kolonialisme Belanda memuncak dan menjadikan bahan bakar gerakan. Intoleransi kedatangan Belanda dan kaki tangannya untuk mendirikan Negara Jawa Timur.

### 1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan sesuai dengan metode Penelitian Sejarah yang ditulis oleh Kuntowijoyo dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah. Pertama, sebelum mengumpulkan sumber, Kuntowijoyo menggaris-bawahi adanya pemilihan topik.<sup>42</sup> Pemilihan topik penulis jatuhkan pada Negara Jawa Timur, dengan alasan kedekatan intelektual dan emosional yang erat mengenai topik tersebut. Peneliti cukup sering membaca buku-buku sejarah politik, dan

---

<sup>41</sup> Peninnda Simanjuntak, *Gerakan Sosial Sebagai Peristiwa Sejarah*, Historisme Edisi Khusus (Lustrum1, No. 21, Tahun X, Agustus 2005. Hlm 48.

<sup>42</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013),hlm. 69.

beberapa buku politik. Sehingga cukup dekat dengan nuansa politik pada masa revolusi. Dari segi kedekatan emosional, Jawa Timur merupakan tempat tinggal sekaligus wilayah yang cukup mudah dijangkau untuk pencarian sumber. Sehingga memudahkan peneliti untuk menyelesaikan penelitiannya.

Selain memperhatikan kedekatan emosional dan intelektual, menurut Helius Sjamsuddin dalam pemilihan topik diperlukan beberapa kriteria, salah satunya adalah nilai.<sup>43</sup> Penelitian ini diharapkan akan mengisi ruang interpretasi baru bagi Sejarah Nasional Indonesia, terutama pada masa revolusi. Selain sebagai pembacaan ulang bahwa dalam revolusi Indonesia, terdapat kesinambungan dan keterputusan pada saat Negara Jawa Timur berdiri.

Langkah selanjutnya adalah *heuristik*, untuk sumber primer, penulis menelusuri kantor arsip Jawa Timur dengan mendapatkan beberapa sumber tentang penolakan dari rakyat Jawa Timur akan pembentukan Negara Jawa Timur. Sumber lain yang didapat dari Kantor Arsip Jawa Timur berupa pembagian wilayah pada masa revolusi dimana Jawa Timur terbagi menjadi beberapa bagian antara Negara Jawa Timur (pendudukan belanda), republik Indonesia dan Negara Madura.

Penelusuran arsip koran dilakukan melalui sumber arsip daring yang berhasil mendapatkan banyak sumber koran terkait pemberitaan pembentukan Negara Jawa Timur, hingga proses pembubarannya. Arsip-arsip tersebut diantaranya adalah Koran *Nieuwe Courant*, *De Vrije Pers*, *De Locomotief*. Selain melakukan pengumpulan sumber melalui daring, peneliti juga mengumpulkan

---

<sup>43</sup> Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007), hlm. 90

arsip koran di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, penulis mendapatkan beberapa laporan lengkap koran *Pelita Rakyat* tentang proses pembentukan Negara Jawa Timur melalui Konferensi Bondowoso.

Penelusuran sumber di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia juga mendapatkan beberapa buku penunjang. Diantaranya adalah buku *Propinsi Djawa Timur, Rakyat Jawa Timur Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia*. Penelusuran sumber juga dilakukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, mendapatkan sumber *algemene secretarie* laporan tentang sidang Negara Jawa Timur, *Staatsblad* pembentukan Negara Jawa Timur, dan beberapa *verslag* dari Recomba Jawa Timur.

*Ketiga*, kritik sumber baik berupa sumber-sumber sekunder maupun sumber primer. Kritik sumber menurut Kuntowijoyo, terbagi menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan intern. Kritik intern sudah penulis lakukan dengan menganalisis sumber-sumber yang sejaman atau hasil dari penelitian sebelumnya.. beberapa sumber yang ditemukan memang kualitasnya buruk, akan tetapi sumber primer yang didapat terkait dengan protes rakyat terhadap Negara Jawa Timur bisa dikatakan valid ketika dibandingkan dengan hasil penelitian yang sudah ada oleh George Mc. Turnan Kahin .

Sumber-sumber yang sudah kami temukan ini membutuhkan daya interpretasi dari penulis. Langkah *keempat* dalam metode penelitian adalah menginterpretasi sumber-sumber yang sudah ditemukan. Rakyat Jawa Timur pada saat itu menyikapi proses pembentukan Negara Jawa Timur sudah menolak atas

dasar tidak ingin terpecah belah. Hal ini berlanjut sampai Negara Jawa Timur sudah terbentuk dan menjalankan pemerintahannya, tidak lepas dari protes keras dari rakyat Jawa Timur. Baik dari kalangan serikat buruh, organisasi kepegawaian maupun organisasi daerah.

Langkah terakhir, historiografi. Penulisan yang sudah dihasilkan dari beberapa langkah di atas dituangkan dalam narasi sejarah. Menurut W.K. Storey untuk membuat narasi sejarah, tugas pertama yang harus dilakukan adalah memilih peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam rentang waktu yang dipilih.<sup>44</sup> Kemudian, rentetan peristiwa penting ini diruntut secara kronologis sehingga tercipta alur sejarah yang kronologis dan mudah dipahami.

Dalam penulisan sejarah, dibutuhkan kejelian untuk menempatkan suara peneliti sebagai narator sekaligus pemilihan alur pelaku sejarah.<sup>45</sup> Setelah melalui tahapan-tahapan sebelumnya, penulis memilih rakyat sebagai subyek utama dalam penelitian ini. Dimana penelitian sebelumnya seringkali menempatkan elite (baik sipil maupun militer) sebagai subyek utama dalam narasi sejarah yang ditulis. Sehingga peran rakyat secara umum kurang mendapatkan porsi yang proporsional dalam kerangka sejarah. Perspektif ini ingin menunjukkan bahwa *history from below* adalah sebuah fakta sejarah yang selama ini belum disuarakan oleh sejarawan.

## 1.8 Sistematika Penulisan

---

<sup>44</sup>Storey. William Kelleher, *Menulis Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 134.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 136.



Penulisan sejarah Negara Jawa Timur: melalui kaidah bahasa yang baku. Penulisan dibagi menjadi 5 bab. Bab I berisi Pendahuluan, menerangkan tentang latarbelakang pembentukan Negara Jawa Timur, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka konsep, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi gambaran umum Jawa Timur. Dari klasifikasi elite dan latarbelakangnya, situasi sosial, politik, dan ekonomi Jawa Timur pada tahun 1945-1950. Bab II juga menerangkan tentang latarbelakang budaya rakyat Jawa Timur. Bab II juga menjelaskan proses awal dari revolusi di Jawa Timur sampai dendam rakyat Jawa Timur pada penjajahan Belanda.

Bab III berisi pembahasan tentang Peranan Elite Jawa Timur dalam proses pembentukan dan perjalanan pemerintahan Negara Jawa Timur. Bab III menjelaskan pertarungan para elite Jawa Timur di dalam Pemerintahan Negara Jawa Timur.

Bab IV berisi pembahasan tentang peranan dan respon rakyat Jawa Timur dalam menghadapi situasi politik di Jawa Timur. Dalam Bab ini disorot lebih banyak organisasi kerakyatan seperti serikat buruh, serikat kepegawaian maupun organisasi kedaerahan. Bab ini juga membahas tentang gerakan penolakan terhadap Negara Jawa Timur melalui demonstrasi maupun gerakan pemberontakan.

Bab V berisi kesimpulan dari penelitian tentang Negara Jawa Timur.